



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

5.1.5. Bidang Kesetaraan Gender

Berikut tabel prioritas penanganan kemiskinan bidang kesetaraan gender berdasarkan pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah. Pertimbangannya meliputi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber daya ekonomi; keterwakilan dalam pengambilan keputusan; beban kerja pengasuhan; akses layanan perlindungan; konektivitas wilayah; serta kerentanan perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas.

No.	Kecamatan	Kategori Prioritas	Alasan Penetapan Prioritas secara Indikatif	Intervensi Program yang Direkomendasikan
1	Taliabu Timur	Prioritas I—Sangat Prioritas	Sebaran permukiman pesisir dan jarak menuju pusat pelayanan berpotensi membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelatihan, pembiayaan, dan layanan perlindungan. Perempuan pada rumah tangga perikanan dan perkebunan juga berpotensi terlibat dalam kegiatan produktif tanpa memperoleh pengakuan,	Pendataan perempuan rentan dan kepala keluarga; pelatihan usaha serta literasi keuangan; kelompok usaha perempuan berbasis perikanan dan perkebunan; akses modal dan pemasaran; layanan perlindungan bergerak; penguatan kesehatan reproduksi; pencegahan perkawinan anak dan kekerasan; serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa.

			perlindungan, atau akses pasar yang memadai.	
2	Taliabu Timur Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Karakter pesisir dan keterbatasan konektivitas dapat memperbesar hambatan perempuan dalam memperoleh pelayanan dasar, perlindungan, dan peluang ekonomi. Jarak serta biaya transportasi berpotensi menyulitkan pelaporan dan penanganan kekerasan, akses kesehatan reproduksi, maupun partisipasi dalam kegiatan publik.	Pos layanan perempuan dan anak keliling; mekanisme pengaduan yang aman; pendampingan korban; transportasi rujukan; pelayanan kesehatan reproduksi; pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir; fasilitas pengasuhan pada kegiatan pelatihan; literasi digital; serta penguatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa.
3	Taliabu Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Potensi pertanian dan perkebunan membuka ruang kerja bagi perempuan, tetapi peran tersebut berpotensi masih bersifat informal, berproduktivitas rendah, dan terbatas dalam penguasaan aset, modal, teknologi, serta keputusan usaha. Beban pekerjaan domestik juga dapat mengurangi kesempatan perempuan mengikuti pelatihan dan kegiatan ekonomi.	Kelompok usaha perempuan; pelatihan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; akses pembiayaan; pendampingan legalitas usaha; kepemilikan dan pencatatan aset bersama; perlindungan pekerja informal; layanan pengasuhan anak; pendidikan kesehatan reproduksi; serta peningkatan kepemimpinan perempuan di desa.
4	Taliabu Utara	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Wilayah yang luas dan permukiman tersebar dapat membatasi akses perempuan terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, pelatihan kerja, layanan administrasi, dan perlindungan sosial. Keterbatasan transportasi juga dapat mengurangi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan.	Pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bergerak; pelatihan usaha di tingkat desa; kelompok simpan pinjam dengan pendampingan; pengembangan usaha pertanian dan perkebunan perempuan; pendidikan kesetaraan; transportasi pelayanan; pencegahan perkawinan anak; serta penguatan data terpilah menurut jenis kelamin.
5	Lede	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Kedekatan dengan pusat kegiatan dapat memberikan peluang ekonomi dan pelayanan yang lebih baik, tetapi	Inkubasi UMKM perempuan; pelatihan digital dan kewirausahaan; akses modal serta pemasaran;



			kesenjangan akses terhadap modal, pekerjaan yang layak, keterampilan, perlindungan, dan kepemimpinan masih mungkin terjadi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi perlu disertai perlindungan bagi perempuan pekerja dan pelaku UMKM.	sertifikasi keterampilan; layanan konsultasi dan pengaduan; perlindungan pekerja perempuan; ruang pengasuhan ramah anak; penguatan organisasi perempuan; dan peningkatan keterwakilan dalam kelembagaan lokal.
6	Taliabu Barat Laut	Prioritas III— Prioritas Sedang	Skala penduduk dan kebutuhan agregat diperkirakan lebih terbatas, tetapi kondisi pesisir tetap dapat menghambat akses perempuan terhadap layanan perlindungan, peluang usaha, informasi, dan pengembangan keterampilan. Intervensi diperlukan untuk mencegah kelompok rentan tertinggal.	Kelompok usaha perempuan pesisir; pelatihan pengolahan hasil laut dan kebun; literasi keuangan; layanan perlindungan berkala; edukasi pencegahan kekerasan; kesehatan reproduksi; dukungan pengasuhan; serta pelibatan perempuan dalam musyawarah dan pengelolaan sumber daya desa.
7	Tabona	Prioritas III— Prioritas Sedang	Skala wilayah dan penduduk relatif kecil, tetapi keterpencilan dapat membatasi pilihan pelayanan, pelatihan, pekerjaan, dan mekanisme pengaduan. Perempuan dari rumah tangga miskin, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas memerlukan pendekatan individual yang lebih terarah.	Pendataan perempuan rentan; layanan terpadu keliling; bantuan usaha mikro; pelatihan berbasis potensi lokal; akses perlindungan sosial; mekanisme pengaduan desa; pendampingan perempuan kepala keluarga; fasilitas publik inklusif; dan penguatan kader perlindungan perempuan dan anak.
8	Taliabu Barat	Prioritas IV— Prioritas Rendah	Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pembiayaan, dan layanan perlindungan secara indikatif relatif lebih baik. Namun, ketimpangan partisipasi, pekerja informal perempuan, kekerasan berbasis gender, dan kantong	Peningkatan mutu layanan perlindungan terpadu; penguatan sistem pengaduan dan rujukan; inkubasi bisnis perempuan; akses pengadaan pemerintah dan pasar; perlindungan pekerja informal; pelatihan kepemimpinan; fasilitas publik ramah perempuan dan anak; serta intervensi khusus pada kantong kerentanan.



perempuan rentan tetap
perlu ditangani.

Arah intervensi berdasarkan tingkat prioritas

- 1) **Prioritas I:** intervensi terpadu dan intensif yang menggabungkan perlindungan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan perempuan, dan pengurangan hambatan akses.
- 2) **Prioritas II:** perluasan akses perempuan terhadap pelayanan, pelatihan, pembiayaan, pekerjaan produktif, serta pengambilan keputusan.
- 3) **Prioritas III:** intervensi terarah bagi perempuan rentan melalui layanan bergerak, usaha mikro, literasi keuangan, dan penguatan mekanisme pengaduan.
- 4) **Prioritas IV:** peningkatan mutu layanan dan penanganan selektif terhadap kesenjangan partisipasi, pekerja informal perempuan, dan kantong kerentanan.

Penentuan lokasi prioritas penanganan kemiskinan bidang kesetaraan gender diperlukan agar kebijakan perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak perempuan dapat dilaksanakan secara lebih terarah sesuai kondisi setiap wilayah. Penetapan prioritas dilakukan melalui pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pembiayaan, sumber daya ekonomi, layanan perlindungan, dan proses pengambilan keputusan. Kondisi geografis kepulauan, konektivitas, beban pengasuhan, serta kerentanan perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas turut menjadi pertimbangan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dikelompokkan ke dalam empat tingkat prioritas. Prioritas I memerlukan intervensi terpadu dan intensif dalam perlindungan perempuan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan kepemimpinan perempuan. Prioritas II diarahkan pada perluasan akses terhadap pelayanan, pelatihan, pembiayaan, dan pekerjaan produktif. Prioritas III berfokus pada layanan bergerak, pengembangan usaha mikro, literasi keuangan, dan penguatan mekanisme pengaduan. Sementara itu, Prioritas IV diarahkan pada peningkatan mutu layanan dan penanganan kelompok rentan secara selektif.

Peta berikut menggambarkan persebaran tingkat prioritas penanganan kemiskinan bidang kesetaraan gender pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan lokasi, intensitas, dan bentuk intervensi agar program mampu mengurangi hambatan struktural, meningkatkan partisipasi perempuan, serta memperluas akses yang setara terhadap pelayanan dan sumber daya pembangunan.

Klasifikasi tersebut masih bersifat indikatif dan perlu divalidasi menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin di tingkat kecamatan dan desa, seperti partisipasi pendidikan dan angkatan kerja, status serta pendapatan pekerjaan, akses kesehatan reproduksi, kepemilikan usaha dan aset, keterwakilan perempuan, perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, serta kondisi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

5.1.6. Bidang Sosial

Berikut tabel prioritas **penanganan kemiskinan bidang sosial** berdasarkan pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah. Pertimbangannya meliputi persebaran kelompok rentan, akses terhadap pelayanan sosial, kondisi geografis, konektivitas, ketepatan data penerima manfaat, cakupan perlindungan sosial, risiko bencana, serta ketersediaan lembaga dan tenaga kesejahteraan sosial.

No.	Kecamatan	Kategori Prioritas	Alasan Penetapan Prioritas secara Indikatif	Intervensi Program yang Direkomendasikan
1	Taliabu Timur	Prioritas I—Sangat Prioritas	Sebaran permukiman pesisir dan jarak menuju pusat pelayanan berpotensi membatasi akses keluarga miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak rentan, dan kelompok marginal terhadap bantuan serta rehabilitasi sosial. Biaya transportasi juga dapat menghambat pendataan, pengaduan, pendampingan, dan rujukan.	Pemutakhiran dan verifikasi data sosial; pelayanan sosial bergerak; bantuan sosial adaptif; pendamping sosial tingkat desa; rehabilitasi sosial; bantuan alat bantu disabilitas; dukungan lanjut usia dan anak rentan; rumah singgah atau rujukan sementara; serta penguatan kesiapsiagaan sosial menghadapi bencana.
2	Taliabu Timur Selatan	Prioritas I—Sangat Prioritas	Karakter wilayah pesisir dan keterbatasan	Unit pelayanan sosial keliling; pendataan

			konektivitas dapat menyebabkan kelompok rentan sulit menjangkau pelayanan sosial. Distribusi bantuan, penanganan kedaruratan, perlindungan anak, dan rujukan kasus sosial berpotensi terlambat apabila tidak didukung pelayanan bergerak dan jaringan pendamping lokal.	keluarga rentan; mekanisme pengaduan desa; bantuan kebutuhan dasar; dukungan transportasi rujukan; perlindungan anak dan perempuan; layanan bagi penyandang disabilitas; penguatan relawan sosial; bantuan sosial kebencanaan; serta pemberdayaan keluarga penerima manfaat.
3	Taliabu Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Persebaran permukiman dan ketergantungan pada pekerjaan primer dapat meningkatkan kerentanan pendapatan keluarga terhadap musim dan perubahan ekonomi. Rumah tangga miskin, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, anak, dan lanjut usia membutuhkan perlindungan sosial yang terhubung dengan pemberdayaan ekonomi.	Integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan; verifikasi data penerima; kelompok usaha bersama; bantuan usaha produktif; pendampingan keluarga; pelayanan disabilitas dan lanjut usia; rehabilitasi rumah tidak layak huni; perlindungan anak; serta program graduasi keluarga dari bantuan sosial.
4	Taliabu Utara	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Wilayah yang luas dan permukiman tersebar dapat menyulitkan pendataan, distribusi bantuan, pemantauan penerima manfaat, serta jangkauan tenaga sosial. Kelompok rentan di desa yang jauh berpotensi tidak memperoleh pelayanan secara rutin dan tepat waktu.	Pendataan sosial berbasis desa; pelayanan dan tenaga sosial keliling; titik distribusi bantuan yang terdesentralisasi; pendampingan keluarga; penguatan Puskesmas atau pusat pelayanan sosial; bantuan alat bantu disabilitas; layanan lanjut usia; kesiapsiagaan bencana; dan sistem rujukan lintas desa.
5	Lede	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Kedekatan dengan pusat kegiatan dapat meningkatkan akses pelayanan, tetapi perkembangan permukiman dan mobilitas penduduk berpotensi menambah kebutuhan layanan sosial. Kantong keluarga miskin, pekerja informal, anak rentan, penyandang disabilitas,	Penguatan pusat pelayanan sosial; pemutakhiran data penerima; layanan pengaduan dan rujukan; bantuan sosial tepat sasaran; rehabilitasi sosial; rumah ramah disabilitas; perlindungan anak; pemberdayaan ekonomi keluarga; serta pemantauan graduasi penerima bantuan.

			dan lanjut usia tetap membutuhkan penanganan terpadu.	
6	Taliabu Barat Laut	Prioritas III— Prioritas Sedang	Skala penduduk dan kebutuhan agregat diperkirakan relatif lebih terbatas, tetapi kondisi pesisir dapat menghambat akses kelompok rentan terhadap informasi, bantuan, alat bantu, dan layanan rujukan. Intervensi terarah diperlukan agar tidak terdapat warga rentan yang tertinggal.	Pelayanan sosial berkala; verifikasi data rumah tangga rentan; bantuan kebutuhan dasar secara selektif; alat bantu disabilitas; layanan lanjut usia; perlindungan anak; kelompok usaha keluarga; relawan sosial desa; serta jalur pengaduan dan rujukan yang mudah diakses.
7	Tabona	Prioritas III— Prioritas Sedang	Jumlah penduduk diperkirakan relatif kecil, tetapi keterpencilan dapat membatasi pilihan pelayanan sosial. Kelompok dengan kebutuhan khusus memerlukan pendekatan individual karena layanan reguler belum tentu tersedia secara lengkap di wilayah tersebut.	Pendataan individual kelompok rentan; kunjungan rumah; layanan sosial bergerak; bantuan sosial selektif; dukungan pengasuhan anak; pelayanan lanjut usia dan disabilitas; bantuan usaha mikro keluarga; dukungan transportasi rujukan; serta penguatan kader sosial desa.
8	Taliabu Barat	Prioritas IV— Prioritas Rendah	Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten, akses terhadap dinas, fasilitas sosial, transportasi, dan layanan rujukan secara indikatif relatif lebih baik. Namun, kantong kemiskinan, tunawisma, pekerja informal, penyandang disabilitas, anak rentan, dan lanjut usia tetap memerlukan penanganan khusus.	Peningkatan mutu layanan sosial terpadu; pusat pengaduan dan rujukan; penjangkauan kantong kemiskinan; rehabilitasi sosial; perlindungan anak; fasilitas publik inklusif; pemberdayaan ekonomi keluarga; integrasi data lintas instansi; serta pemantauan graduasi bantuan sosial.

Arah intervensi berdasarkan tingkat prioritas

- 1) **Prioritas I:** pelayanan sosial terpadu dan intensif, pemutakhiran data, bantuan sosial adaptif, rehabilitasi sosial, pemberdayaan keluarga, serta perlindungan kelompok rentan.
- 2) **Prioritas II:** perluasan jangkauan pelayanan, penguatan pendamping sosial, distribusi bantuan, sistem pengaduan, dan rujukan antardesa.

- 3) **Prioritas III:** intervensi terarah melalui kunjungan rumah, pelayanan bergerak, bantuan selektif, dan dukungan bagi kelompok dengan kebutuhan khusus.
- 4) **Prioritas IV:** peningkatan mutu layanan, integrasi data, penanganan kantong kerentanan, serta penguatan sistem graduasi penerima bantuan.

Penentuan lokasi prioritas penanganan kemiskinan bidang sosial diperlukan agar pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial dapat diarahkan kepada wilayah serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Penetapan prioritas dilakukan melalui pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan persebaran keluarga miskin dan kelompok rentan, aksesibilitas pelayanan sosial, kondisi geografis kepulauan, konektivitas antardesa, ketepatan data penerima manfaat, serta ketersediaan tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dikelompokkan ke dalam empat tingkat prioritas. Prioritas I memerlukan pelayanan sosial terpadu dan intensif, meliputi pemutakhiran data, bantuan sosial adaptif, rehabilitasi sosial, pemberdayaan keluarga, dan perlindungan kelompok rentan. Prioritas II diarahkan pada perluasan jangkauan pelayanan, penguatan pendamping sosial, distribusi bantuan, serta sistem pengaduan dan rujukan. Prioritas III berfokus pada kunjungan rumah, pelayanan bergerak, dan bantuan selektif. Sementara itu, Prioritas IV diarahkan pada peningkatan mutu layanan, integrasi data, dan penanganan kantong kerentanan.

Peta berikut menggambarkan persebaran tingkat prioritas penanganan kemiskinan bidang sosial pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan lokasi, intensitas, dan bentuk intervensi agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran, mudah dijangkau, dan mampu memperkuat kemandirian keluarga penerima manfaat.

Klasifikasi tersebut masih bersifat indikatif dan perlu divalidasi menggunakan data sosial tingkat kecamatan dan desa, seperti data keluarga miskin, desil kesejahteraan, penerima bantuan sosial, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, perempuan kepala keluarga, kondisi rumah tidak layak huni, serta jangkauan pelayanan sosial.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah



5.1.7. Bidang Infrastruktur Dasar

Berikut tabel prioritas **penanganan kemiskinan bidang infrastruktur dasar** berdasarkan pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah. Pertimbangannya meliputi kondisi geografis kepulauan, persebaran permukiman, konektivitas antardesa, akses jalan dan transportasi, air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi, drainase, serta akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi.

No.	Kecamatan	Kategori Prioritas	Alasan Penetapan Prioritas secara Indikatif	Intervensi Program yang Direkomendasikan
1	Taliabu Timur	Prioritas I— Sangat Prioritas	Sebaran permukiman pesisir dan jarak menuju pusat pelayanan berpotensi menyebabkan ketimpangan akses jalan, transportasi, air minum, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Keterbatasan konektivitas juga dapat meningkatkan biaya distribusi serta menghambat akses masyarakat miskin menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan pelayanan pemerintahan.	Peningkatan jalan penghubung dan jembatan; pembangunan dermaga atau tambatan perahu; transportasi perintis; sistem penyediaan air minum; sanitasi berbasis masyarakat; listrik desa dan energi terbarukan; perluasan telekomunikasi; drainase permukiman; serta padat karya pembangunan infrastruktur.
2	Taliabu Timur Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Karakter pesisir dan keterbatasan konektivitas darat maupun laut berpotensi memperbesar biaya pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur. Sebagian permukiman dapat menghadapi kesulitan memperoleh air minum aman, sanitasi, listrik yang stabil, komunikasi, dan akses cepat menuju fasilitas pelayanan dasar.	Peningkatan jalan pesisir; jembatan dan gorong-gorong; dermaga desa; sarana transportasi laut; penampungan air hujan dan jaringan air minum; sanitasi layak; listrik berbasis energi surya; penguatan sinyal telekomunikasi; perlindungan pantai; dan infrastruktur tangguh bencana.
3	Taliabu Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Persebaran permukiman serta kegiatan pertanian dan perkebunan membutuhkan konektivitas yang memadai menuju pasar dan pusat pelayanan.	Jalan desa dan jalan produksi; jembatan penghubung; air minum perdesaan; sanitasi dan pengelolaan limbah domestik; elektrifikasi permukiman; akses



			Keterbatasan jalan produksi, air minum, sanitasi, listrik, serta telekomunikasi dapat menekan produktivitas dan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga miskin.	internet desa; drainase; perbaikan rumah tidak layak huni; serta padat karya berbasis masyarakat.
4	Taliabu Utara	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Wilayah yang luas dengan permukiman tersebar dapat meningkatkan kebutuhan jaringan jalan, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan sistem air minum. Jarak antardesa juga berpotensi menyebabkan biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan infrastruktur menjadi relatif tinggi.	Peningkatan jalan antardesa; pembangunan jembatan; angkutan perintis; sistem air minum berbasis klaster; sanitasi desa; listrik dan energi terbarukan untuk wilayah terpencil; menara telekomunikasi; internet fasilitas publik; serta pembentukan kelompok pemelihara infrastruktur.
5	Lede	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Kedekatan dengan pusat kegiatan memberikan peluang akses yang lebih baik, tetapi pertumbuhan permukiman dapat meningkatkan kebutuhan air minum, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, jalan lingkungan, listrik, dan telekomunikasi. Kapasitas layanan perlu ditingkatkan agar tidak muncul kawasan dengan kualitas infrastruktur rendah.	Peningkatan kapasitas jaringan air minum; sanitasi dan pengelolaan air limbah; drainase; jalan lingkungan; pengelolaan sampah; penerangan jalan; peningkatan kualitas permukiman; perluasan internet; serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.
6	Taliabu Barat Laut	Prioritas III— Prioritas Sedang	Skala penduduk dan kebutuhan agregat diperkirakan lebih terbatas, tetapi karakter pesisir dan kepulauan tetap dapat menimbulkan hambatan transportasi, air minum, sanitasi, listrik, dan komunikasi. Penanganan dapat diarahkan pada desa atau kantong permukiman yang paling tertinggal.	Tambatan perahu dan transportasi lokal; perbaikan jalan desa; penampungan air hujan; sistem air minum skala kecil; jamban dan sanitasi komunal; energi surya; penguatan sinyal telekomunikasi; penerangan jalan; serta pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat.

7	Tabona	Prioritas III— Prioritas Sedang	Jumlah penduduk dan skala pelayanan diperkirakan relatif kecil, tetapi keterpencilan dapat menyebabkan biaya penyediaan jaringan konvensional menjadi tinggi. Infrastruktur yang bersifat modular, mandiri, dan sesuai dengan skala permukiman lebih tepat diterapkan.	Air minum skala desa; penampungan air hujan; sanitasi rumah tangga; listrik tenaga surya atau sistem hibrida; internet fasilitas publik; perbaikan jalan lokal; transportasi rujukan; perbaikan rumah secara selektif, serta dana pemeliharaan berbasis komunitas.
8	Taliabu Barat	Prioritas IV— Prioritas Rendah	Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi kabupaten, wilayah ini secara indikatif memiliki akses jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, transportasi, dan fasilitas pelayanan yang relatif lebih baik. Namun, pertumbuhan kawasan dapat menimbulkan masalah drainase, sampah, sanitasi, kepadatan permukiman, dan ketimpangan layanan.	Peningkatan mutu dan kapasitas jaringan; penanganan kawasan permukiman rentan; air minum perkotaan; sanitasi dan pengolahan air limbah; drainase dan pengendalian genangan; pengelolaan sampah; jalan lingkungan; penerangan jalan; serta infrastruktur publik yang inklusif dan tangguh bencana.

Arah intervensi berdasarkan tingkat prioritas

- 5) **Prioritas I:** pembangunan dan perluasan infrastruktur dasar secara intensif, terutama konektivitas, air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan akses ke pusat pelayanan.
- 6) **Prioritas II:** peningkatan kapasitas jaringan, pemerataan pelayanan antardesa, penguatan infrastruktur permukiman, serta sistem operasi dan pemeliharaan.
- 7) **Prioritas III:** intervensi terarah dengan teknologi skala kecil, modular, dan berbasis masyarakat pada desa atau kantong permukiman yang tertinggal.
- 8) **Prioritas IV:** peningkatan kualitas serta kapasitas layanan, penanganan kepadatan permukiman, dan pengurangan kesenjangan infrastruktur secara selektif.

Penentuan lokasi prioritas penanganan kemiskinan bidang infrastruktur dasar diperlukan untuk memastikan pembangunan dan peningkatan pelayanan dapat diarahkan pada wilayah yang memiliki kebutuhan relatif lebih besar. Ketersediaan infrastruktur dasar berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup, beban pengeluaran rumah tangga, produktivitas ekonomi, serta akses masyarakat menuju pendidikan, kesehatan, pasar, dan pelayanan pemerintahan.

Penetapan prioritas dilakukan melalui pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah. Pertimbangan yang digunakan meliputi kondisi geografis kepulauan, persebaran permukiman, konektivitas antardesa, akses jalan dan transportasi, ketersediaan air minum dan sanitasi, pelayanan listrik, jaringan telekomunikasi, kondisi permukiman, serta jarak menuju pusat pelayanan dasar.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dikelompokkan ke dalam empat tingkat prioritas. Prioritas I memerlukan pembangunan dan perluasan infrastruktur secara intensif. Prioritas II diarahkan pada peningkatan kapasitas jaringan dan pemerataan pelayanan antardesa. Prioritas III berfokus pada intervensi terarah menggunakan teknologi skala kecil, modular, dan berbasis masyarakat. Sementara itu, Prioritas IV diarahkan pada peningkatan kualitas serta kapasitas layanan dan penanganan kesenjangan infrastruktur secara selektif.

Peta berikut menggambarkan persebaran tingkat prioritas penanganan kemiskinan bidang infrastruktur dasar pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan lokasi, intensitas, dan jenis intervensi agar pembangunan infrastruktur lebih tepat sasaran, merata, berkelanjutan, dan responsif terhadap karakteristik setiap wilayah.

Klasifikasi tersebut masih bersifat indikatif dan perlu divalidasi menggunakan data tingkat kecamatan dan desa, seperti kondisi jalan, waktu tempuh, akses air minum dan sanitasi layak, listrik, telekomunikasi, internet, kondisi rumah, drainase, pengelolaan sampah, transportasi, serta jarak menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

5.2. Lokus Kecamatan

Berdasarkan hasil analisis lokasi prioritas menurut kecamatan pada setiap bidang kemiskinan, baik dimensi konsumsi maupun nonkonsumsi, diketahui bahwa beberapa kecamatan memiliki tingkat prioritas tinggi pada lebih dari satu bidang. Oleh karena itu, diperlukan analisis komposit untuk menentukan lokus penanganan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Pulau Taliabu.

Hasil skoring komposit ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kecamatan yang membutuhkan intervensi lintas sektor secara lebih intensif, menentukan fokus alokasi sumber daya, serta menyusun program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik dan

kebutuhan setiap wilayah. Hasil pengelompokan lokus prioritas kecamatan disajikan pada tabel dan peta berikut.

Analisis lokus komposit dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat prioritas penanganan kemiskinan pada setiap kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Analisis ini mengintegrasikan tujuh bidang, yaitu kemiskinan konsumsi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, sosial, dan infrastruktur dasar.

Setiap tingkat prioritas pada masing-masing bidang dikonversi menjadi skor. Prioritas I diberi skor 12, Prioritas II skor 9, Prioritas III skor 6, dan Prioritas IV skor 3. Seluruh skor kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai komposit setiap kecamatan. Semakin tinggi total skor yang diperoleh, semakin besar akumulasi permasalahan lintas bidang dan semakin tinggi urgensi penanganannya.

Berdasarkan hasil skoring, Taliabu Timur Selatan memperoleh nilai tertinggi sebesar 81, diikuti Taliabu Timur sebesar 78, Taliabu Selatan sebesar 75, dan Taliabu Utara sebesar 72. Keempat kecamatan tersebut termasuk dalam kategori lokus sangat tinggi sehingga membutuhkan intervensi lintas sektor yang terpadu dan intensif. Lede memperoleh skor 60 dan termasuk kategori tinggi, sedangkan Taliabu Barat Laut dan Tabona masing-masing memperoleh skor 42 dan 39 sehingga berada dalam kategori sedang. Taliabu Barat memperoleh skor 30 dan termasuk kategori rendah secara komposit. Hasil tersebut tidak berarti kecamatan dengan skor lebih rendah terbebas dari permasalahan kemiskinan. Sebagai contoh, Taliabu Barat tetap menjadi Prioritas I pada bidang kemiskinan konsumsi meskipun berada dalam kategori rendah secara komposit. Oleh karena itu, hasil komposit perlu dibaca bersama dengan hasil analisis setiap bidang agar intervensi tetap mampu menjawab permasalahan khusus pada masing-masing kecamatan.

Tabel berikut menyajikan hasil skoring, peringkat, dan kategori lokus komposit pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil ini dapat digunakan sebagai rujukan awal dalam menentukan fokus wilayah, intensitas intervensi, koordinasi lintas sektor, dan arah alokasi sumber daya. Penetapan akhirnya tetap perlu divalidasi menggunakan data statistik, data administratif, serta kondisi aktual di tingkat desa dan rumah tangga.

Tabel Skoring Lokus Komposit Penanganan Kemiskinan

Kabupaten Pulau Taliabu · Tujuh Bidang Analisis Prioritas

PERINGKAT	KECAMATAN	KONSUMSI	PENDIDIKAN	KESEHATAN	KETENAGA-KERJAAN	GENDER	SOSIAL	INFRA-STRUKTUR	TOTAL	KATEGORI LOKUS
1	Taliabu Timur Selatan	9	12	12	12	12	12	12	81	Sangat Tinggi
2	Taliabu Timur	6	12	12	12	12	12	12	78	Sangat Tinggi
3	Taliabu Selatan	9	9	9	12	12	12	12	75	Sangat Tinggi
4	Taliabu Utara	12	12	12	9	9	9	9	72	Sangat Tinggi
5	Lede	6	9	9	9	9	9	9	60	Tinggi
6	Taliabu Barat Laut	6	6	6	6	6	6	6	42	Sedang
7	Tabona	3	6	6	6	6	6	6	39	Sedang
8	Taliabu Barat	12	3	3	3	3	3	3	30	Rendah

Skor: Prioritas I = 12 · Prioritas II = 9 · Prioritas III = 6 · Prioritas IV = 3

● Sangat Tinggi ● Tinggi ● Sedang ● Rendah

Semakin tinggi total skor, semakin tinggi urgensi penanganan lintas sektor.

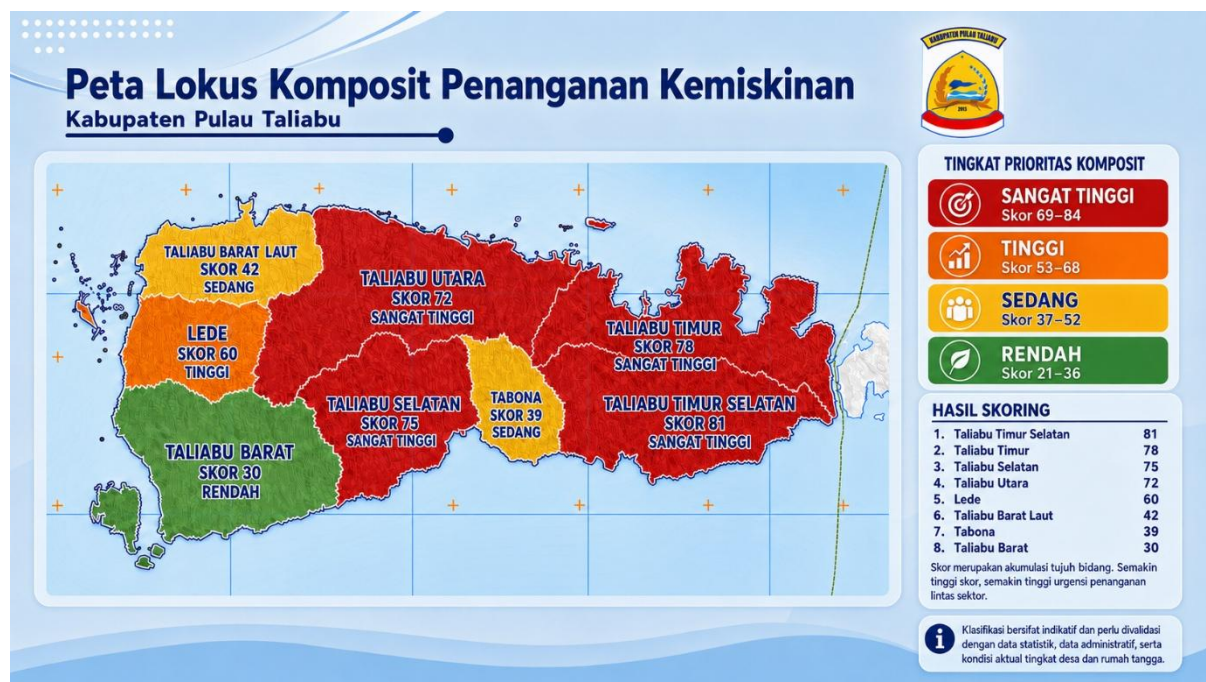
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

Peta lokus kecamatan disusun untuk memberikan gambaran spasial mengenai tingkat prioritas penanganan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam peta, warna merah menunjukkan kategori lokus sangat tinggi dengan skor 69-84, oranye menunjukkan kategori tinggi dengan skor 53-68, kuning menunjukkan kategori sedang dengan skor 37-52, dan hijau menunjukkan kategori rendah dengan skor 21-36.

Peta berikut diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan fokus wilayah, intensitas intervensi, koordinasi lintas sektor, serta arah alokasi sumber daya penanggulangan kemiskinan. Kecamatan dengan prioritas sangat tinggi membutuhkan penanganan yang lebih intensif dan terpadu, sedangkan kecamatan dengan prioritas lebih rendah tetap memerlukan intervensi sesuai permasalahan khusus pada masing-masing bidang.

Klasifikasi lokus tersebut masih bersifat indikatif. Oleh karena itu, hasil pemetaan perlu divalidasi lebih lanjut menggunakan data statistik, data administratif, dan kondisi aktual di tingkat desa serta rumah tangga agar kebijakan dan program yang disusun lebih tepat sasaran.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

Hasil analisis komposit terhadap tujuh bidang kemiskinan menunjukkan adanya perbedaan tingkat urgensi penanganan antarwilayah di Kabupaten Pulau Taliabu. Analisis mencakup kemiskinan konsumsi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, sosial, dan infrastruktur dasar. Total skor digunakan untuk menentukan urutan lokus, dengan ketentuan bahwa semakin tinggi skor, semakin besar akumulasi permasalahan lintas bidang dan semakin intensif intervensi yang diperlukan.

1. Taliabu Timur Selatan — skor 81

Taliabu Timur Selatan menempati urutan pertama dan termasuk kategori **lokus sangat tinggi**. Kecamatan ini berada pada Prioritas I dalam enam bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, sosial, dan infrastruktur dasar. Pada bidang kemiskinan konsumsi, wilayah ini berada pada Prioritas II.



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Taliabu Timur Selatan bersifat multidimensi. Keterbatasan konektivitas wilayah pesisir berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, pelayanan sosial, kesempatan kerja, air minum, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi.

Arah penanganan perlu mengutamakan:

- peningkatan konektivitas darat dan laut;
- perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- transportasi pelajar dan pasien;
- penguatan perlindungan sosial;
- pemberdayaan ekonomi pesisir;
- peningkatan keterampilan tenaga kerja;
- perlindungan perempuan dan kelompok rentan;
- penyediaan air minum, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi.

Taliabu Timur Selatan layak ditempatkan sebagai **lokus utama pertama** dalam intervensi lintas sektor.

2. Taliabu Timur — skor 78

Taliabu Timur berada pada urutan kedua dan termasuk kategori **lokus sangat tinggi**. Kecamatan ini juga berada pada Prioritas I dalam enam bidang nonkonsumsi. Namun, pada bidang kemiskinan konsumsi, Taliabu Timur berada pada Prioritas III.

Skor tersebut menunjukkan bahwa tantangan utamanya lebih kuat pada keterbatasan akses pelayanan dan aspek struktural dibandingkan kemampuan konsumsi rumah tangga semata. Sebaran permukiman pesisir, akses pasar, pelayanan dasar, konektivitas, dan keterbatasan pengolahan komoditas menjadi faktor indikatif yang perlu diperhatikan.

Intervensi perlu diarahkan pada:

- penguatan jaringan jalan dan transportasi pesisir;
- pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan;
- peningkatan keterampilan tenaga kerja;
- pengolahan hasil perikanan dan perkebunan;
- pelayanan sosial bergerak;
- pemberdayaan ekonomi perempuan;
- peningkatan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi.

Taliabu Timur merupakan **lokus utama kedua**, dengan pendekatan yang berorientasi pada perbaikan akses dan penguatan kapasitas ekonomi lokal.

3. Taliabu Selatan — skor 75

Taliabu Selatan menempati urutan ketiga dan termasuk kategori **lokus sangat tinggi**. Kecamatan ini berada pada Prioritas I untuk bidang ketenagakerjaan, kesetaraan gender, sosial, dan infrastruktur dasar. Pada bidang kemiskinan konsumsi, pendidikan, dan kesehatan, Taliabu Selatan berada pada Prioritas II.



Pola tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara kerentanan ekonomi rumah tangga, keterbatasan kesempatan kerja produktif, kesenjangan akses pelayanan, dan kebutuhan infrastruktur dasar. Potensi pertanian dan perkebunan belum tentu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila belum didukung pengolahan hasil, akses pasar, pembiayaan, dan konektivitas.

Arah intervensi meliputi:

- peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan;
- hilirisasi komoditas lokal;
- pelatihan kerja dan pengembangan usaha;
- penguatan ekonomi perempuan;
- perlindungan keluarga dan kelompok rentan;
- peningkatan jalan produksi;
- penyediaan air minum, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi;
- penguatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Taliabu Selatan perlu menjadi **lokus utama ketiga**, terutama untuk menghubungkan pembangunan ekonomi produktif dengan peningkatan pelayanan dasar.

4. Taliabu Utara — skor 72

Taliabu Utara berada pada urutan keempat dan termasuk kategori **lokus sangat tinggi**. Kecamatan ini menempati Prioritas I dalam bidang kemiskinan konsumsi, pendidikan, dan kesehatan, serta Prioritas II dalam ketenagakerjaan, kesetaraan gender, sosial, dan infrastruktur dasar.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga dan jangkauan pelayanan. Wilayah yang luas dan persebaran permukiman dapat meningkatkan jarak, waktu, serta biaya untuk memperoleh pangan, pendidikan, kesehatan, pasar, dan pelayanan pemerintahan.

Intervensi utama perlu mencakup:

- bantuan pangan dan stabilisasi distribusi kebutuhan pokok;
- penguatan ketahanan pangan keluarga;
- perluasan akses sekolah dan fasilitas kesehatan;
- pemerataan guru dan tenaga kesehatan;
- pelayanan sosial bergerak;
- transportasi antardesa;
- pengembangan pertanian dan perkebunan;
- pembangunan infrastruktur berbasis klaster permukiman.

Taliabu Utara merupakan **lokus utama keempat**, dengan penekanan pada pengurangan beban pengeluaran dan perluasan jangkauan pelayanan dasar.

5. Lede — skor 60



Lede menempati urutan kelima dan termasuk kategori **lokus tinggi**. Kecamatan ini berada pada Prioritas II dalam enam bidang nonkonsumsi dan Prioritas III dalam bidang kemiskinan konsumsi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di Lede cenderung berada pada tingkat tinggi tetapi tidak seintensif empat kecamatan sebelumnya. Kedekatan relatif dengan pusat kegiatan memberikan peluang pengembangan perdagangan, jasa, UMKM, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kapasitas layanan dan kualitas sumber daya manusia masih perlu diperkuat.

Arah intervensi meliputi:

- penguatan UMKM dan perdagangan;
- pelatihan kerja dan kewirausahaan;
- peningkatan kapasitas sekolah dan fasilitas kesehatan;
- penguatan perlindungan sosial;
- pemberdayaan ekonomi perempuan;
- peningkatan air minum, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan;
- penanganan keluarga dan kelompok rentan secara terarah.

Lede dapat berfungsi sebagai **lokus penguatan pelayanan dan ekonomi wilayah penyangga**.

6. Taliabu Barat Laut — skor 42

Taliabu Barat Laut berada pada urutan keenam dan termasuk kategori **lokus sedang**. Seluruh bidang di kecamatan ini berada pada Prioritas III.

Keseragaman skor menunjukkan bahwa kebutuhan intervensinya bersifat moderat dan tersebar pada berbagai bidang, tanpa satu dimensi yang sangat dominan. Meskipun demikian, karakter wilayah pesisir tetap dapat menimbulkan hambatan konektivitas, akses pelayanan, dan pemasaran hasil produksi.

Intervensi sebaiknya bersifat terarah, meliputi:

- pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial secara berkala;
- pengembangan usaha perikanan dan perkebunan;
- bantuan alat produksi dan pengolahan hasil;
- peningkatan transportasi lokal;
- air minum dan sanitasi skala desa;
- energi terbarukan dan telekomunikasi;
- perlindungan kelompok rentan.

Taliabu Barat Laut merupakan **lokus pemantapan dan pencegahan**, agar kerentanan sedang tidak berkembang menjadi masalah yang lebih berat.

7. Tabona — skor 39

Tabona berada pada urutan ketujuh dan termasuk kategori **lokus sedang**. Kecamatan ini menempati Prioritas III dalam enam bidang nonkonsumsi dan Prioritas IV pada bidang kemiskinan konsumsi.



Skor tersebut menunjukkan bahwa tekanan konsumsi rumah tangga secara komposit relatif lebih rendah, tetapi masih terdapat kebutuhan pada akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan sosial, kesetaraan gender, dan infrastruktur. Karena jumlah penduduk dan skala pelayanan diperkirakan lebih kecil, pendekatan berskala besar belum tentu menjadi pilihan paling efisien.

Intervensi yang disarankan adalah:

- layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bergerak;
- transportasi pelajar dan pasien;
- pengembangan usaha mikro berbasis potensi lokal;
- dukungan kelompok rentan secara individual;
- air minum dan sanitasi skala kecil;
- energi surya dan internet fasilitas publik;
- pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat.

Tabona perlu diposisikan sebagai **lokus intervensi selektif dan berbasis kebutuhan khusus**.

8. Taliabu Barat — skor 30

Taliabu Barat berada pada urutan kedelapan dan termasuk kategori **lokus rendah secara komposit**. Wilayah ini menempati Prioritas IV dalam enam bidang nonkonsumsi, tetapi berada pada Prioritas I dalam bidang kemiskinan konsumsi.

Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa skor komposit rendah tidak berarti wilayah ini bebas dari masalah kemiskinan. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, akses pelayanan di Taliabu Barat secara indikatif relatif lebih baik. Namun, tingginya prioritas kemiskinan konsumsi menunjukkan adanya rumah tangga yang menghadapi tekanan daya beli, harga kebutuhan, biaya perumahan, atau ketergantungan terhadap pasar.

Intervensi perlu difokuskan pada:

- bantuan pangan yang tepat sasaran;
- stabilisasi harga dan pasar murah;
- pemutakhiran data rumah tangga miskin;
- penguatan UMKM dan pekerja informal;
- peningkatan kualitas permukiman;
- perlindungan sosial adaptif;
- penanganan kantong kemiskinan;
- pemantauan graduasi penerima bantuan.

Taliabu Barat merupakan **lokus rendah secara komposit, tetapi lokus khusus untuk penanganan kemiskinan konsumsi**.

Kesimpulan umum

Urutan lokus menunjukkan tiga kelompok utama penanganan:



1. **Lokus utama lintas sektor:** Taliabu Timur Selatan, Taliabu Timur, Taliabu Selatan, dan Taliabu Utara. Keempat kecamatan membutuhkan intervensi terpadu, intensif, dan mendapat porsi sumber daya lebih besar.
2. **Lokus penguatan:** Lede. Intervensi diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan, produktivitas ekonomi, dan perannya sebagai wilayah penyangga.
3. **Lokus terarah dan selektif:** Taliabu Barat Laut, Tabona, dan Taliabu Barat. Program dilaksanakan berdasarkan kantong permasalahan dan kebutuhan khusus setiap bidang.

Urutan komposit sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar pembagian anggaran. Hasilnya harus dibaca bersama skor per bidang. Kecamatan dengan skor komposit rendah tetap dapat menjadi prioritas tinggi untuk satu permasalahan tertentu, seperti Taliabu Barat pada kemiskinan konsumsi.

Penetapan final perlu divalidasi melalui data statistik dan administratif, konsultasi dengan perangkat daerah, verifikasi kondisi desa, serta pemutakhiran data rumah tangga. Dengan demikian, urutan lokus dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran, adil, terintegrasi, dan sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

5.3. Rekomendasi

Berikut rekomendasi penanganan kemiskinan berdasarkan tujuh bidang urusan. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai arahan umum dalam penyusunan program lintas perangkat daerah.

No	Bidang Urusan	Rekomendasi
1	Kemiskinan Konsumsi	Memutakhirkan dan memverifikasi data rumah tangga miskin sampai tingkat desa; meningkatkan ketepatan sasaran bantuan pangan dan perlindungan sosial; melaksanakan stabilisasi harga serta pasar murah pada wilayah dengan biaya distribusi tinggi; memperkuat ketahanan pangan keluarga; memperbaiki rumah tidak layak huni, air minum, dan sanitasi; menghubungkan bantuan sosial dengan pelatihan kerja, bantuan usaha produktif, dan pendampingan graduasi keluarga penerima manfaat.
2	Pendidikan	Memperluas akses pendidikan pada desa sulit dijangkau melalui sekolah satu atap, kelas jauh, transportasi, atau asrama pelajar; pemerataan distribusi guru dan menyediakan insentif serta rumah dinas; meningkatkan kondisi ruang kelas, sanitasi, perpustakaan, laboratorium, dan internet sekolah; memberikan beasiswa dan perlengkapan bagi siswa miskin; memperkuat transisi antarjenjang; serta membangun sistem pendataan dan penelusuran anak tidak sekolah dan siswa berisiko putus sekolah.
3	Kesehatan	Memperkuat puskesmas, pustu, Posyandu, dan pelayanan kesehatan bergerak; pemerataan dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan; menyediakan ambulans darat atau laut dan memperkuat sistem rujukan; memastikan kepesertaan aktif JKN bagi keluarga miskin; meningkatkan pelayanan ibu, bayi, balita, gizi, dan kesehatan reproduksi; mengendalikan malaria dan penyakit menular; serta memperluas akses air minum, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

4	Ketenagakerjaan	Menyelenggarakan pelatihan kerja yang sesuai dengan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa; mengembangkan hilirisasi serta pengolahan komoditas lokal; memperkuat UMKM melalui bantuan peralatan, pembiayaan, pendampingan, legalitas, dan pemasaran; memperluas pemagangan, sertifikasi, dan layanan informasi kerja; mengembangkan padat karya produktif; mendorong wirausaha pemuda dan perempuan; serta memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal.
5	Kesetaraan Gender	Mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran; memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, pekerjaan, pelatihan, pembiayaan, aset, dan pasar; memperkuat usaha perempuan dan perempuan kepala keluarga; meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan; menyediakan layanan pengaduan, perlindungan, dan rujukan korban kekerasan; mencegah perkawinan anak; menyediakan dukungan pengasuhan; serta memperkuat data terpilah menurut jenis kelamin.
6	Sosial	Mengintegrasikan data kemiskinan dan kelompok rentan; memperkuat pusat pelayanan sosial, pendamping sosial, dan mekanisme pengaduan; menyelenggarakan pelayanan sosial bergerak serta kunjungan rumah; memastikan bantuan sosial adaptif dan tepat sasaran; memperkuat rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak rentan, dan kelompok marginal; menyediakan alat bantu dan dukungan rujukan; menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi; serta memperkuat pemantauan graduasi penerima bantuan.
7	Infrastruktur Dasar	Memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dermaga, serta transportasi penghubung desa; memperluas akses air minum dan sanitasi layak; meningkatkan elektrifikasi melalui jaringan maupun energi terbarukan; memperkuat telekomunikasi dan internet fasilitas publik; meningkatkan kualitas jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, dan permukiman; memperbaiki rumah tidak layak huni; menerapkan infrastruktur modular untuk permukiman terpencil; serta membentuk sistem operasi dan pemeliharaan berbasis masyarakat.

Rekomendasi lintas bidang

Seluruh rekomendasi tersebut sebaiknya dilaksanakan dengan prinsip berikut:

- 1) Memprioritaskan Taliabu Timur Selatan, Taliabu Timur, Taliabu Selatan, dan Taliabu Utara sebagai lokus utama lintas sektor;
- 2) Menggunakan data terpadu sampai tingkat desa dan rumah tangga;
- 3) Menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi;



- 4) Menerapkan pelayanan bergerak untuk wilayah sulit dijangkau;
- 5) Mengintegrasikan perencanaan dan pendanaan antarperangkat daerah;
- 6) Melibatkan pemerintah desa, masyarakat, kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pelaku usaha;
- 7) Menetapkan indikator keluaran, hasil, penerima manfaat, dan target graduasi yang terukur;
- 8) melakukan pemantauan serta evaluasi berdasarkan wilayah dan kelompok penerima manfaat.

5.4. Target Penurunan kemiskinan

Target penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025–2029 disusun sebagai arah indikatif untuk memperkuat konsistensi kebijakan, program, dan alokasi sumber daya penanggulangan kemiskinan. Penetapan target mempertimbangkan tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 6,63 persen serta kecenderungan perubahan kemiskinan selama lima tahun terakhir yang masih mengalami fluktuasi.

Untuk mengantisipasi perbedaan kapasitas pelaksanaan program dan kondisi pembangunan, target disusun dalam tiga skenario. Skenario moderat menggunakan penurunan sekitar 0,15 poin persentase per tahun, sehingga tingkat kemiskinan diproyeksikan mencapai 6,03 persen pada 2029. Skenario utama mengikuti kecenderungan rata-rata penurunan historis sekitar 0,215 poin per tahun dan menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 5,77 persen pada 2029. Sementara itu, skenario akseleratif menetapkan penurunan sekitar 0,30 poin per tahun sehingga tingkat kemiskinan diharapkan mencapai 5,43 persen pada akhir periode.

Skenario utama dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan karena tetap mempertimbangkan kemampuan penurunan historis dan kebutuhan percepatan. Dengan skenario ini, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun secara bertahap dari 6,63 persen pada 2025 menjadi 6,42 persen pada 2026, 6,20 persen pada 2027, 5,99 persen pada 2028, dan 5,77 persen pada 2029.

Pencapaian target tersebut memerlukan intervensi terpadu yang tidak hanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonominya. Program prioritas perlu mencakup perlindungan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, peningkatan ketahanan pangan keluarga, penciptaan kesempatan kerja, penguatan UMKM, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar.

Pelaksanaan program perlu difokuskan pada kecamatan dengan tingkat prioritas komposit sangat tinggi, yaitu Taliabu Timur Selatan, Taliabu Timur, Taliabu Selatan, dan Taliabu Utara. Lede sebagai lokus tinggi juga membutuhkan penguatan pelayanan dan produktivitas ekonomi. Sementara itu, intervensi pada Taliabu Barat Laut, Tabona, dan Taliabu Barat perlu disesuaikan dengan masalah khusus serta kantong kemiskinan yang terdapat di masing-masing wilayah.

Target tersebut masih bersifat indikatif sehingga perlu diselaraskan dengan target resmi RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan data BPS, kemampuan fiskal daerah, dan hasil evaluasi program setiap tahun. Pemantauan perlu dilakukan secara berkala agar target dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan harga pangan, bencana, perlambatan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau guncangan lain yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Target Penurunan Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Pulau Taliabu · Tahun 2025–2029

TAHUN	TARGET MODERAT	TARGET UTAMA	TARGET AKSELERATIF
2025	6,63%	6,63%	6,63%
2026	6,48%	6,42%	6,33%
2027	6,33%	6,20%	6,03%
2028	6,18%	5,99%	5,73%
2029	6,03%	5,77%	5,43%

● Moderat: turun sekitar 0,15 poin per tahun

● Utama: mengikuti tren rata-rata $\pm 0,215$ poin per tahun

● Akseleratif: turun sekitar 0,30 poin per tahun

Angka merupakan target indikatif dan perlu diselaraskan dengan RPJMD.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

Grafik berikut menyajikan target penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2025–2029 melalui tiga skenario, yaitu moderat, utama, dan akseleratif. Ketiga skenario menggunakan tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 6,63 persen sebagai titik awal, kemudian dibedakan berdasarkan kecepatan penurunan yang ingin dicapai setiap tahun.

Pada skenario moderat, tingkat kemiskinan ditargetkan turun sekitar 0,15 poin persentase per tahun hingga mencapai 6,03 persen pada 2029. Skenario ini menggambarkan pencapaian yang relatif konservatif dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal, kapasitas pelaksanaan program, dan kemungkinan terjadinya guncangan ekonomi.

Skenario utama mengikuti kecenderungan rata-rata penurunan historis sekitar 0,215 poin persentase per tahun. Dalam skenario ini, tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 6,42 persen pada 2026, 6,20 persen pada 2027, 5,99 persen pada 2028, dan 5,77 persen pada 2029. Skenario utama dinilai paling realistis untuk digunakan sebagai acuan perencanaan karena tetap menantang, tetapi masih mempertimbangkan kemampuan penurunan yang pernah dicapai daerah.

Sementara itu, skenario akseleratif menetapkan penurunan sekitar 0,30 poin persentase per tahun. Melalui skenario ini, tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 6,33 persen pada 2026, 6,03 persen pada 2027, 5,73 persen pada 2028, dan 5,43 persen pada 2029. Pencapaian skenario ini membutuhkan intervensi lintas sektor yang lebih kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi program yang konsisten sampai tingkat desa dan rumah tangga.

Perbedaan antarjalur pada grafik menunjukkan bahwa intensitas kebijakan sangat menentukan besarnya capaian penurunan kemiskinan. Karena itu, pencapaian target tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi perlu didukung oleh stabilisasi harga pangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar.

Angka dalam grafik masih bersifat indikatif dan perlu diselaraskan dengan target resmi RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan data BPS, kemampuan fiskal daerah, dan hasil evaluasi program setiap tahun. Sumbu vertikal pada grafik dipotong pada rentang 5,2–6,8 persen untuk memperjelas perbedaan antarskenario, bukan untuk memperbesar capaian penurunan secara menyedatkan.

Grafik Target Penurunan Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Pulau Taliabu · Tiga Skenario Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT** (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu) berbasis Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah



BAB VI PENUTUP

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**





BAB VI. PENUTUP

Penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan atau kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga berhubungan erat dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan multidimensi, lintas sektor, dan berbasis karakteristik wilayah.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki kondisi geografis kepulauan dengan persebaran penduduk dan permukiman yang relatif berjauhan. Kondisi tersebut memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar, pusat ekonomi, pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan pemerintahan. Biaya transportasi dan distribusi yang relatif tinggi juga dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok serta memperbesar beban pengeluaran rumah tangga. Tantangan tersebut membutuhkan kebijakan yang tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan tingkat kerentanan setiap kecamatan, desa, serta rumah tangga.

Hasil analisis lokasi prioritas menunjukkan adanya perbedaan intensitas permasalahan pada setiap bidang dan kecamatan. Analisis komposit terhadap bidang kemiskinan konsumsi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, sosial, dan infrastruktur dasar menempatkan Taliabu Timur Selatan, Taliabu Timur, Taliabu Selatan, dan Taliabu Utara sebagai lokus dengan tingkat prioritas sangat tinggi. Lede berada pada kategori prioritas tinggi, Taliabu Barat Laut dan Tabona berada pada kategori sedang, sedangkan Taliabu Barat berada pada kategori rendah secara komposit.

Urutan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa kecamatan dengan kategori lebih rendah telah terbebas dari permasalahan kemiskinan. Setiap kecamatan tetap memiliki persoalan khusus yang harus ditangani. Taliabu Barat, misalnya, berada pada kategori rendah secara komposit, tetapi termasuk Prioritas I dalam bidang kemiskinan konsumsi. Hal ini memperlihatkan bahwa hasil komposit harus dibaca bersama hasil analisis setiap bidang agar kebijakan tidak mengabaikan permasalahan yang bersifat spesifik.

Penentuan lokus prioritas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengarahkan program, kegiatan, pendanaan, dan sumber daya secara lebih efektif. Kecamatan dengan prioritas sangat tinggi membutuhkan intervensi yang lebih intensif, terpadu, dan berkelanjutan. Sementara itu, kecamatan dengan prioritas tinggi dan sedang memerlukan program penguatan serta pencegahan agar kerentanan yang ada tidak berkembang menjadi kemiskinan yang lebih berat. Pada kecamatan dengan prioritas lebih rendah, intervensi perlu difokuskan pada kantong kemiskinan, rumah tangga rentan, dan kelompok dengan kebutuhan khusus.

Dalam bidang kemiskinan konsumsi, kebijakan perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Bantuan pangan, perlindungan sosial, stabilisasi harga, peningkatan ketahanan pangan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dihubungkan dengan pelatihan kerja, pengembangan usaha, akses pembiayaan, dan pendampingan graduasi. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sementara, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju kemandirian keluarga.

Pada bidang pendidikan, prioritas utama adalah memastikan seluruh anak memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan guru, penyediaan sarana belajar, transportasi atau asrama pelajar, beasiswa bagi siswa miskin, dan pencegahan putus sekolah perlu dilaksanakan secara terarah. Pendidikan harus menjadi instrumen utama untuk memutus rantai



kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan pelayanan dasar, memperkuat puskesmas, pustu, Posyandu, pelayanan bergerak, dan sistem rujukan. Pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kepesertaan aktif JKN, penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, pengendalian malaria dan penyakit menular, serta penyediaan air minum dan sanitasi harus menjadi bagian dari intervensi terpadu. Kesehatan yang baik akan mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pada bidang ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada penciptaan pekerjaan produktif dan peningkatan pendapatan. Potensi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa perlu dikembangkan melalui pelatihan keterampilan, hilirisasi komoditas, penguatan UMKM, akses pembiayaan, pemasaran, pemagangan, dan perlindungan pekerja informal. Pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat lokal dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pemuda serta perempuan.

Kesetaraan gender juga harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Perempuan perlu memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pembiayaan, aset, teknologi, pasar, dan proses pengambilan keputusan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, dukungan bagi perempuan kepala keluarga, serta penyediaan layanan pengaduan dan rujukan harus diperkuat hingga tingkat desa.

Dalam bidang sosial, pemerintah daerah perlu meningkatkan ketepatan data, jangkauan pelayanan, kualitas pendampingan, dan integrasi bantuan. Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, anak rentan, perempuan kepala keluarga, serta kelompok yang terdampak bencana dan guncangan ekonomi membutuhkan perlindungan yang mudah diakses. Pelayanan sosial bergerak, kunjungan rumah, rehabilitasi sosial, mekanisme pengaduan, dan pemberdayaan keluarga perlu dikembangkan secara konsisten.

Pemenuhan infrastruktur dasar menjadi fondasi bagi keberhasilan seluruh intervensi tersebut. Ketersediaan jalan, jembatan, dermaga, transportasi, air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi, internet, drainase, dan hunian layak sangat menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan dan kesempatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi kepulauan, keberlanjutan operasional, ketahanan terhadap bencana, dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan.

Target penurunan tingkat kemiskinan tahun 2025–2029 harus menjadi instrumen pengendalian kinerja pembangunan. Dengan tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 6,63 persen, skenario utama mengarahkan penurunan secara bertahap menuju sekitar 5,77 persen pada tahun 2029. Target ini membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan fiskal, integrasi program, serta evaluasi tahunan. Apabila kapasitas pelaksanaan dan dukungan pendanaan dapat ditingkatkan, skenario akseleratif menuju 5,43 persen pada 2029 dapat dijadikan sasaran yang lebih progresif.

Pencapaian target tersebut harus didukung sistem data yang mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik dan administratif perlu dipadukan dengan hasil verifikasi di tingkat desa dan rumah tangga. Pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi keluarga, perpindahan penduduk, kehilangan pekerjaan, bencana, kenaikan harga, atau perubahan status kesejahteraan dapat segera teridentifikasi. Penguatan data juga penting untuk mencegah kesalahan sasaran, tumpang tindih bantuan, serta terabaikannya kelompok yang berhak menerima pelayanan.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, instansi



vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, lembaga keagamaan, media, dan masyarakat. Perencanaan serta penganggaran harus mengacu pada lokasi dan sasaran rumah tangga yang sama sehingga setiap program saling melengkapi dan menghasilkan dampak yang lebih besar.

Pelaksanaan kebijakan juga perlu disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas. Setiap program harus memiliki indikator penerima manfaat, keluaran, hasil, wilayah sasaran, dan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Evaluasi tidak hanya menilai besarnya anggaran yang terserap atau jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga perubahan nyata pada pendapatan, pengeluaran, akses pelayanan, kondisi hunian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian keluarga.

Seluruh arah kebijakan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA—Mandiri, Unggul, Damai, dan Adaptif. Mandiri diwujudkan melalui penguatan ekonomi keluarga dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan. Unggul diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Damai diwujudkan melalui perlindungan sosial, kesetaraan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Adaptif diwujudkan melalui ketahanan terhadap perubahan ekonomi, bencana, iklim, kenaikan harga, dan berbagai bentuk guncangan.

Pada akhirnya, penanggulangan kemiskinan harus dipahami sebagai upaya memulihkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak, produktif, aman, dan bermartabat. Keberhasilannya tidak hanya ditandai oleh menurunnya persentase penduduk miskin, tetapi juga oleh semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk belajar, bekerja, berusaha, memperoleh pelayanan, berpartisipasi, dan menentukan masa depannya.

Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil analisis yang disajikan masih bersifat indikatif dan perlu terus disempurnakan melalui data terbaru, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta verifikasi kondisi aktual di lapangan. Dengan komitmen, kolaborasi, konsistensi, dan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat, merata, inklusif, dan berkelanjutan sesuai semangat pembangunan Kabupaten MUDA.

